

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Desa merupakan kesatuan wilayah yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri dikepalai oleh kepala desa serta dihuni oleh sejumlah keluarga.¹ Koentjaraningrat mendefinisikan desa sebagai komunitas kecil yang menetap di suatu tempat. Ia tidak menegaskan bahwa masyarakat desa identik dengan pertanian, sehingga dapat dikatakan masyarakat desa sebagai suatu komunitas kecil yang memiliki aktifitas ekonomi yang beragam, bukan hanya di sektor pertanian.

Masyarakat adalah kumpulan manusia yang saling berinteraksi dan menempati suatu wilayah tertentu. Apabila dilihat dari tempat tinggalnya masyarakat terbagi menjadi masyarakat desa dan masyarakat kota. Masyarakat kota dianggap sebagian besar bersifat individualis, modern dan lainnya. Sedangkan masyarakat desa masih bersifat tradisional, kebersamaan yang masih kental dengan budaya.

Pemerintah Desa memiliki tugas dan peran penting untuk setiap kegiatan yang ada di desa dimana kepala desa dibantu perangkat desa dalam menjalankan pemerintahan atau kebijakan.

¹ Jamaludin. 2015. *Sosiologi Pedesaan*. Bandung: Pustaka Setia, hlm. 5

Hubungan pemerintah desa dan masyarakat desa yang baik sangatlah penting berikut dengan sikap terbuka dari pemerintah untuk menampung keinginan dan aspirasi dari masyarakat setempat. Hal ini dapat dilakukan seperti dalam kegiatan musyawarah desa yang diadakan setiap satu bulan sekali, maupun dalam kegiatan lain yang melibatkan pemerintah desa dengan masyarakat.

Dalam pemberdayaan masyarakat desa yang dimaksudkan disini adalah masyarakat berperan aktif untuk meningkatkan kualitas dirinya. Dengan kata lain pemerintah desa hanya memberikan fasilitas maupun tempat dimana masyarakat dapat menyuarakan keinginan dan harapannya. Namun, untuk meningkatkan kualitas diri masing-masing individu adalah dengan pola pikir dari diri sendiri untuk berkembang menjadi lebih baik. Sedangkan untuk menciptakan desa yang unggul atau maju merupakan tanggung jawab bersama sebagai warga atau masyarakat dimana kita tinggal.

Desa Trangkil merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Trangkil, terbagi menjadi 8 dusun (RW) dengan 51 RT. Wilayah ini termasuk kedalam wilayah tropis, yang mayoritas penduduk bekerja sebagai petani, peternak, pedagang, dan lain-lain.

Masalah dan potensi yang dimiliki di desa ini cukup beragam, khususnya dalam bidang pembangunan meliputi masyarakat yang miskin dalam bidang ekonomi, terbatasnya saluran irigasi, rumah tidak layak huni, kondisi jalan yang kurang baik, dan sebagainya. Masyarakat memiliki harapan

bukan hanya pada aspek kehidupan melainkan penghidupan (penunjang) dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pemerintah desa memiliki peranan penting dalam mengalokasikan dana terkait program pembangunan maupun pemberdayaan desa. Adapun cara yang dilakukan yaitu dengan mengadakan Musyawarah Desa untuk menyusun Rencana Jangka Menengah Pembangunan Desa (RPJMDes), dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). Maka dari itu, pemerintah desa harus kembali pada tugas pokok dan fungsinya sebagai pemimpin desa, diantaranya :

1. Membina kehidupan masyarakat desa.
2. Membina ekonomi desa.
3. Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
4. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, melalui program yang dilakukan pemerintah desa mengenai pelaksanaan pengembangan serta pemberdayaan masyarakat. Kemudian apa saja peran serta kegiatan yang akan dilakukan dalam pelaksanaannya. Dalam pelaksanaannya partisipasi baik dari pemerintah desa maupun masyarakat desa sangatlah penting, terutama peran dari pemerintah desa. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul "Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat."

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah, terdapat rumusan masalah berikut:

1. Apa program pemerintah Desa Trangkil dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat ?
2. Bagaimana implementasi dari program pemerintah Desa Trangkil dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat ?
3. Bagaimana hasil yang telah dicapai oleh pemerintah Desa Trangkil dalam pemberdayaannya ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari rumusan masalah adalah untuk mengetahui :

1. Program pemerintah Desa Trangkil dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat.
2. Implementasi dari program pemerintah Desa Trangkil dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat.
3. Hasil yang telah dicapai oleh pemerintah Desa Trangkil dalam pemberdayaannya.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

- a) Menambah pengetahuan mengenai pelayanan publik dalam administrasi negara.
- b) Pembandingan mengenai teori dan fakta yang terdapat di lapangan.
- c) Meninjau dan menambah substansi perpustakaan.
- d) Bagi penelitian selanjutnya dapat digunakan sebagai referensi atau bahan pertimbangan.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Bagi Institusi (Pemerintah Desa) : penelitian ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran yang relevan bagi pemerintah desa khususnya pengaruh pembangunan terhadap meningkatnya pemberdayaan masyarakat di Desa Trangkil.
- b) Bagi Peneliti : melalui penelitian ini dapat mengetahui terkait pemberdayaan masyarakat maupun peran dari pemerintah desa itu sendiri membuat wawasan bertambah.
- c) Bagi Peneliti Selanjutnya : sebagai rujukan atau referensi mengenai peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat.

E. Landasan Penelitian

1. Landasan Teoritis

Teori peran adalah perspektif dimana setiap kegiatan dalam kehidupan memiliki perannya masing-masing. Dalam pelaksanaannya setiap orang memiliki tanggung jawab atau peran baik terhadap orang lain, pekerjaan maupun diri sendiri.

Peran merupakan aspek dinamis kedudukan atau status, yaitu seseorang telah dinilai memiliki peran apabila hak dan kewajiban telah sesuai dengan kedudukan yang dimiliki.²

Pemberdayaan dapat dikatakan sebagai suatu proses penyelenggaraan pembangunan, yang bertumpu pada beberapa elemen masyarakat serta peningkatan kemampuan masyarakat.³

Pemberdayaan masyarakat desa dapat juga dikatakan sebagai pemberdayaan insani, yakni suatu pembangunan yang objek utamanya adalah aspek pengembangan dan peningkatan kemampuan, skill dan memberdayakan masyarakat di daerah pedesaan sebagai warga Negara, seperti pendidikan dan pelatihan, pembinaan usaha ekonomi, kesehatan, spiritual dan sebagainya.

² Soekanto, Soerjono. 2002. *Teori Peranan*. Jakarta : Bumi Aksara, hlm. 243

³ Rafsanjani, dkk, *Kemitraan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan Kepala Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa*, (Jurnal Administrasi Publik(JAP), Vol. 1, No. 4), hlm. 68

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses penyelenggaraan pembangunan. Dalam pelaksanaannya sesungguhnya merupakan upaya-upaya sadar dari masyarakat dan pemerintah baik dengan menggunakan sumber daya yang bersumber dari desa, bantuan pemerintah maupun bantuan-bantuan organisasi-organisasi atau lembaga domestic maupun internasional untuk menciptakan perubahan-perubahan kearah yang lebih baik.

Pembangunan Desa merupakan serangkaian kegiatan yang direncanakan baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun budaya demi terciptanya masyarakat yang sejahtera. Pembangunan dibagi kedalam dua aspek, yaitu⁴:

a. Aspek Fisik

Pembangunan Desa dalam aspek fisik, pembangunan yang objek utamanya dalam aspek fisik (sarana, prasarana dan manusia) dipedesaan seperti jalan desa, bangunan rumah, pemukiman. Jembatan, bendungan, irigasi, sarana ibadah, pendidikan dan lain sebagainya. Pembangunan dalam aspek fisik ini selanjutnya disebut Pembangunan Desa.

b. Aspek Insan

Pembangunan Desa dalam aspek pemberdayaan insan, yaitu pembangunan yang objek utamanya aspek pembangunan dan peningkatan kemampuan, skill, dan memberdayakan masyarakat di daerah pedesaan

⁴ Adisasmata, Rahardjo. 2013. *Teori-teori Pembangunan Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu, h. 17

sebagai Warga Negara, seperti pendidika dan pelatihan, pembinaan usaha ekonomi, kesehatan, spiritual, dan sebagainya. Pembangunan dalam aspek seperti ini selanjutnya disebut sebagai Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pemerintahan desa merupakan kumpulan dari mereka yang memiliki tugas dan wewenang dalam berlangsungnya kebijakan yang ada di desa. Adanya pemerintahan desa ialah memberikan layanan serta membangun desa untuk kepentingan bersama. Selain itu, sarana prasarana seperti pembangunan merupakan salah satu dari peran pemerintah yang dilaksanakan sesuai rencana seperti adanya RPJM-Desa maupun rapat Musrenbang.

Pemberdayaan bertujuan dalam membentuk individu dan masyarakat yang mandiri.⁵ Seseorang yang mandiri ialah mampu bersikap, bertindak dan mengambil keputusan dengan matang serta mampu mengendalikan diri.

Pemberdayaan Masyarakat dapat diartikan sebagai cara untuk mendampingi masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup maupun lingkungannya. Hal tersebut bisa dilakukan dengan mengenali terlebih dahulu apa permasalahan yang ada, kemudian mencari akar dari masalah tersebut untuk kemudian bersama mencari solusi serta cara terbaik mengatasi masalah maupun mengembangkan potensi yang ada.

⁵ Ambar, Teguh Sulistiyani. 2004. *Kemitraan dan Model- Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media, h. 82.

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat. Sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, hakikat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik di bidang ekonomi, sosial, agama, dan budaya.⁶

Pemberdayaan masyarakat terutama di pedesaan tidak cukup hanya dengan meningkatkan produktivitas, memberikan kesempatan usaha yang sama atau memberi modal saja, tetapi harus diikuti pula dengan perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat, mendukung berkembangnya potensi masyarakat melalui peningkatan peran, produktivitas dan efisiensi serta memperbaiki empat akses yaitu:⁷

- 1) akses terhadap sumber daya,
- 2) akses terhadap teknologi,
- 3) akses terhadap pasar, dan
- 4) akses terhadap sumber pembiayaan.

Keempat akses ini, disamping menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memfasilitasinya, juga diperlukan peran aktif dari kelompok-kelompok masyarakat di desa dan kelurahan untuk membentuk usaha bersama atas kepentingan bersama pula.

⁶ Widjaja, HAW. 2003. *Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, h. 167-168

⁷ *Ibid.*, h. 169

2. Kerangka Konseptual

Peran merupakan aspek dinamis kedudukan atau status, yaitu seseorang telah dinilai memiliki peran apabila hak dan kewajiban telah sesuai dengan kedudukan yang dimiliki. Setiap orang bisa memiliki berbagai macam peran sebagaimana kedudukan yang dimiliki dapat mengatur perilaku seseorang. Hal tersebut dapat diartikan bahwa peran dapat menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat, serta kesempatan apa yang masyarakat berikan kepadanya. Peran lebih menunjukkan pada suatu proses, fungsi, dan penyesuaian diri. Seseorang atau lembaga memiliki posisi atau kedudukan menjalankan suatu peranan dalam masyarakat.⁸

Adapun peranan serta pelaksanaan sesuai dengan yang diharapkan, yaitu untuk komunikasi antar manusia, sebab peran itu mengatur pola tingkah laku seseorang atau kelompok masyarakat sesuai dengan fungsi dan kedudukannya.⁹

Pemberdayaan masyarakat harus menyentuh ke berbagai sector baik itu pada sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun sumber daya ekonomi. Dalam pelaksanaan pemberdayaan dan pembangunan yang ada di desa peran pemerintah desa terkait alokasi dana desa maupun jenis kegiatan yang akan dilaksanakan perlu adanya partisipasi dari masyarakat. Anggaran dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memerhatikan

⁸ Soekanto, Soerjono. 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 212

⁹ Soelaeman. 1994. *Pendidikan dalam Keluarga*. Bandung: CV Alfabeta, h. 119-122

jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa.

Apabila pembahasan tersebut di bentuk dalam bentuk skema, maka dapat terlihat sebagai berikut :



Gambar 1. Skema Kerangka Konseptual tentang Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dilakukan sebagai perbandingan maupun menghindari adanya kesamaan dengan penelitian sebelumnya.

Pertama, Karya Rivan Nugraha dengan judul "*Peran Dana Desa dalam Memberdayakan Masyarakat*". Penelitian ini berawal dari minimnya anggaran dana desa yang berdampak pada pembangunan dan pemberdayaan yang tidak merata. Anggaran Pemerintah turun pada tahun 2015 untuk seluruh desa.

Penelitian ini memiliki tujuan membandingkan bagaimana kondisi masyarakat sebelum dan sesudah adanya anggaran dana desa khususnya Desa Tanggeung. Teori yang digunakan adalah teori pemberdayaan, melalui metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Kedua, Karya Iyan Supriatna berjudul "*Strategi Pemerintah Desa Dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat Melalui Wirausaha.*" Pemikiran bahwa potensi khususnya bidang ekonomi desa belum dikembangkan Pemerintah Desa Cileunyi Wetan menjadi awal dari penelitian ini. Tujuan dari penelitian untuk mengetahui strategi dan program Pemerintah Desa Cileunyi Wetan dalam pemberdayaan melalui wirausaha bagi ekonomi masyarakat. Teori yang digunakan adalah teori pemberdayaan, melalui metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Ketiga, Karya Nasehadin dengan judul "*Upaya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat untuk Pembangunan Cibiru Hilir.*" Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai peran LPMD dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan lingkungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode deskriptif, sedangkan untuk teori yang digunakan yaitu teori pembangunan.

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di kantor Desa Trangkil. Alasan dipilihnya lokasi ini sebagai pusat penelitian yaitu sebagai pusat dari pemerintahan desa dimana mengurus dan mengatur jalannya kegiatan yang ada di desa, adanya sumber data yang di perlukan, memudahkan pencarian data katena jarak yang tidak terlalu jauh dari rumah penulis.

2. Paradigma dan Pendekatan

Paradigma dengan melihat realitas sosial sebagai sesuatu yang utuh, kompleks, dinamis, dan sarat makna disebut paradigma penelitian kualitatif atau memandang fenomena lebih unggul, statis, dan konkrit disebut paradigma postpositivisme.¹⁰

Pada penelitian kualitatif, data yang diperoleh di lapangan sesuai dengan fakta. Sedangkan dalam pendekatannya melihat pada kasus tertentu dalam konteks atau kehidupan nyata kontemporer atau disebut sebagai studi kasus.

¹⁰ Kuswana. 2011. *Taksonomi Berpikir*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, h. 43

3. Metode Penelitian

Metode penelitian deskriptif yang dalam pencarian datanya dilakukan secara faktual dan cermat terkait objek atau bidang tertentu secara sistematis.

Metode dalam menyusun rumusan masalah yang memadukan penelitian untuk menggali atau memotret situasi sosial secara menyeluruh, luas dan mendalam atau disebut Metode Deskriptif.¹¹ Menyeluruh artinya penelitian tersebut dapat tersampaikan pada seluruh masyarakat. Secara luas yaitu, menggunakan pola pikir yang terbuka. Sedangkan mendalam adalah penelitian ini dapat diterima atau tersampainya maksud dan tujuan.

4. Jenis Data

Data deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini, dimana penggambaran yang dilakukan sesuai dengan realita yang sebenarnya. Data kualitatif dapat diperoleh dari catatan di lapangan, ucapan dan sikap responden, dokumen pribadi dan lain-lain. Data yang digunakan tidak berupa angka melainkan berupa kata-kata atau gambar.

5. Sumber Data

¹¹ Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, h. 209

a. Sumber Data Primer

Data yang berasal dari kepala desa, sekretaris desa, serta masyarakat sekitar.

b. Sumber Data Sekunder

Data yang berasal dari observasi, wawancara, dan dokumentasi.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Metode Observasi

Dalam metode observasi yaitu mengamati sesuatu sesuai dengan fakta atau realita yang terjadi dengan benar. Pada metode observasi kita melihat secara langsung atau meneliti ke lapangan terhadap realita yang ada dimasyarakat tanpa adanya tambahan maupun pengurangan pada objek yang dijadikan penelitian tersebut.

b. Metode Wawancara

Dalam metode wawancara memiliki peranan penting dalam penelitian yaitu berisi keterangan tentang kehidupan manusia di masyarakat beserta hal lain yang berkaitan. Penulis bertanya kepada pihak-pihak terkait yaitu kepala desa, sekretaris desa, beberapa lembaga kemasyarakatan beserta masyarakat sekitar secara langsung.

c. Studi Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada subjek penelitian secara tidak langsung melainkan melihat pada dokumen yang berhubungan

dengan penelitian baik berupa dokumen maupun kegiatan yang dilakukan di lapangan dan lain sebagainya. Penulis melihat pada beberapa dokumen, salah satunya mengenai RPJM-Desa di Desa Trangkil.

7. Teknik Penentuan Keabsahan Data

Teknik triangulasi digunakan dalam menentukan keabsahan data. Teknik triangulasi atau pengumpulan analisis data terhadap beberapa informan yang relevan dan pengecekan langsung terhadap kegiatan yang dilakukan. Dengan kata lain pengumpulan data melalui teknik triangulasi adalah membandingkan hasil observasi dengan wawancara.



8. Teknik Analisis Data

Penelitian kualitatif digunakan dalam analisis data dengan teknik sebagai berikut :

a. Pengumpulan Data.

Dalam analisis pengumpulan data pada penelitian ini yaitu melalui observasi, wawancara dan dokumentasi secara lengkap tanpa ada penambahan atau pengurangan.

b. Penyajian Data.

Data dikumpulkan terlebih dahulu dan diseleksi untuk memperoleh kesimpulan sebelum disajikan.

c. Penarikan Kesimpulan.

Kesimpulan dapat ditarik setelah data dipilih sesuai dengan data yang dibutuhkan untuk menghasilkan kesimpulan sehingga dapat diketahui se jelas mungkin tentang kelebihan dan kekurangan dari suatu kegiatan yang dilakukan di masyarakat.

